



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR DATA DAN METADATA DATA KETENAGAKERJAAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan, perlu menetapkan standar data dan metadata data ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Standar Data dan Metadata Data Ketenagakerjaan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1008);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1008);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG STANDAR DATA DAN METADATA DATA KETENAGAKERJAAN TAHUN 2022.

KESATU : Standar Data dan Metadata Data Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Data dan Metadata Data Ketenagakerjaan sebagaimana Diktum KESATU menjadi acuan bagi Produsen Data di Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

KETIGA : Standar Data dan Metadata Data Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun oleh Walidata Ketenagakerjaan berdasarkan daftar Data yang ditetapkan dalam Forum Satu Data Ketenagakerjaan Tahun 2021.

KEEMPAT : Produsen Data Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyerahkan Data Ketenagakerjaan yang disertai Standar Data dan Metadata paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya dari jadwal pemutakhiran kepada Sekretariat Produsen Data Ketenagakerjaan.

- KELIMA : Sekretariat Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT menyampaikan Data Ketenagakerjaan yang disertai Standar Data dan Metadata paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya dari jadwal pemutakhiran kepada Walidata Ketenagakerjaan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR DATA DAN METADATA
DATA KETENAGAKERJAAN

A. Daftar Data Ketenagakerjaan

1. Daftar Data Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang dikumpulkan oleh Produsen Data di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
 - a. Daftar Data Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang dikumpulkan oleh Produsen Data di Pusat

NO.	NAMA DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN/ PENYERAHAN KE WALIDATA	PRODUSEN DATA
1)	Data Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan	Triwulan	Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan
2)	Data Program dan Materi Pelatihan	Triwulan	Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan
3)	Data Lembaga Pelatihan Kerja	Semester	Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi
4)	Data <i>Talent Corner</i> di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Unit Pelaksana Teknis Pusat)	Triwulan	a) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan b) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan
5)	Data Peserta Pemagangan Dalam Negeri	Triwulan	Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan

NO.	NAMA DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN/ PENYERAHAN KE WALIDATA	PRODUSEN DATA
6)	Data Penyelenggara Pemagangan Dalam Negeri	Triwulan	Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan
7)	Data Peserta Pemagangan Luar Negeri	Triwulan	Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan
8)	Data Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri	Triwulan	Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan
9)	Data Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	Triwulan	Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan
10)	Data Calon Pekerja Migran Indonesia yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Triwulan	Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan
11)	Data Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Triwulan	Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas
12)	Data Tenaga Kerja yang meningkat Produktivitasnya	Triwulan	Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas
13)	Data Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tahunan	Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas
14)	Data Instruktur	Semester	Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
15)	Data Tenaga Pelatihan	Semester	Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
16)	Data Tenaga Kerja Tersertifikasi	Triwulan	Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi
17)	Data Lembaga Sertifikasi Profesi Terlisensi	Semester	Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi

- b. Daftar Data Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang dikumpulkan oleh Produsen Data di Provinsi

NO.	NAMA DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN / PENYERAHAN KE WALIDATA	PRODUSEN DATA
1)	Data Lembaga Pelatihan Kerja	Semester	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
2)	Data Peserta Pemagangan Dalam Negeri	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
3)	Data Penyelenggara Pemagangan Dalam Negeri	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
4)	Data Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
5)	Data Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi

- c. Daftar Data Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang dikumpulkan oleh Produsen Data di Kabupaten/Kota

NO.	NAMA DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN/ PENYERAHAN KE WALIDATA	PRODUSEN DATA
1)	Data Lembaga Pelatihan Kerja	Semester	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
2)	Data Peserta Pemagangan Dalam Negeri	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
3)	Data Penyelenggara Pemagangan Dalam Negeri	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
4)	Data Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota

2. Daftar Data Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang akan dikumpulkan oleh Produsen Data di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

a. Daftar Data Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang akan dikumpulkan oleh Produsen Data di Pusat

NO.	NAMA DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN/ PENYERAHAN KE WALIDATA	PRODUSEN DATA
1)	Data Tenaga Kerja yang ditempatkan oleh Bursa Kerja Khusus	Triwulan	Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
2)	Data Tenaga Kerja yang ditempatkan oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Triwulan	Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
3)	Data Tenaga Kerja Disabilitas yang ditempatkan	Triwulan	Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
4)	Data Tenaga Kerja yang ditempatkan oleh Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga	Bulanan	Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
5)	Data Informasi Jabatan	Tahunan	Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
6)	Data Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan	Bulanan	Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
7)	Data Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Bulanan	Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
8)	Data Lowongan Kerja di Luar Negeri	Bulanan	Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
9)	Data Pekerja Migran Indonesia yang mendapat Layanan Perlindungan di Negara Penempatan	Bulanan	Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
10)	Data Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Bulanan	Direktorat Bina Penempatan dan

NO.	NAMA DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN/ PENYERAHAN KE WALIDATA	PRODUSEN DATA
	di Luar Negeri		Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
11)	Data Perjanjian Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Luar Negeri	Tahunan	Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
12)	Data Tenaga Kerja Peserta Program Padat Karya	Triwulan	Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja
13)	Data Tenaga Kerja Mandiri/Wirausaha	Triwulan	Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja
14)	Data Tenaga Kerja yang dipekerjakan oleh Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan	Triwulan	Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja
15)	Data Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) yang menjadi Inkubator Wirausaha	Triwulan	Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja
16)	Data Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing	Bulanan	Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
17)	Data Tenaga Kerja Asing yang berlaku	Bulanan	Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
18)	Data Pengantar Kerja	Semester	Direktorat Bina Pengantar Kerja
19)	Data Petugas Antarkerja	Semester	Direktorat Bina Pengantar Kerja
20)	Data Pencari Kerja terdaftar	Bulanan	Pusat Pasar Kerja
21)	Data Lowongan Pekerjaan terdaftar	Bulanan	Pusat Pasar Kerja
22)	Data Tenaga Kerja yang ditempatkan	Bulanan	Pusat Pasar Kerja

- b. Daftar Data Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang dikumpulkan oleh Produsen Data di Provinsi

NO.	NAMA DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN/ PENYERAHAN KE WALIDATA	PRODUSEN DATA
1)	Data Tenaga Kerja yang ditempatkan oleh Bursa Kerja Khusus	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
2)	Data Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
3)	Data Tenaga Kerja Disabilitas yang ditempatkan	Triwulan	Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
4)	Data Tenaga Kerja yang ditempatkan oleh Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
5)	Data Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
6)	Data Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
7)	Data Tenaga Kerja Peserta Program Padat Karya	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
8)	Data Tenaga Kerja Mandiri/Wirausaha	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
9)	Data Tenaga Kerja yang dipekerjakan oleh Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
10)	Data Pengantar Kerja	Semester	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
11)	Data Petugas Antarkerja	Semester	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
12)	Data Pencari Kerja terdaftar	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi

NO.	NAMA DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN/ PENYERAHAN KE WALIDATA	PRODUSEN DATA
13)	Data Lowongan Pekerjaan terdaftar	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
14)	Data Tenaga Kerja yang ditempatkan	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi

- c. Daftar Data Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang akan dikumpulkan oleh Produsen Data di Kabupaten/Kota

NO.	NAMA DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN/ PENYERAHAN KE WALIDATA	PRODUSEN DATA
1)	Data Tenaga Kerja yang ditempatkan oleh Bursa Kerja Khusus	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
2)	Data Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
3)	Data Tenaga Kerja Disabilitas yang ditempatkan	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
4)	Data Tenaga Kerja yang ditempatkan oleh Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
5)	Data Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
6)	Data Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
7)	Data Tenaga Kerja Peserta Program Padat Karya	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
8)	Data Tenaga Kerja Mandiri/Wirausaha	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota

NO.	NAMA DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN/ PENYERAHAN KE WALIDATA	PRODUSEN DATA
9)	Data Tenaga Kerja yang dipekerjakan oleh Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
10)	Data Pengantar Kerja	Semester	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
11)	Data Petugas Antarkerja	Semester	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
12)	Data Pencari kerja terdaftar	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
13)	Data Lowongan Pekerjaan terdaftar	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
14)	Data Tenaga Kerja yang ditempatkan	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota

3. Daftar Data Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang akan dikumpulkan oleh Produsen Data di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
 - a. Daftar Data Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dikumpulkan oleh Produsen Data di Pusat

NO.	NAMA DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN/ PENYERAHAN KE WALIDATA	PRODUSEN DATA
1)	Data Perusahaan yang menerapkan Struktur Skala Upah	Triwulan	Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan
2)	Data Peraturan Perusahaan yang disahkan	Bulanan	Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan
3)	Data Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan	Bulanan	Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan
4)	Data Upah Minimum Provinsi	Tahunan	Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan
5)	Data Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Tahunan	Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja

NO.	NAMA DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN/ PENYERAHAN KE WALIDATA	PRODUSEN DATA
6)	Data Perselisihan yang ditangani dan diselesaikan oleh Mediator	Bulanan	Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
7)	Data Perselisihan yang ditangani dan diselesaikan oleh Arbiter dan Konsiliator	Bulanan	Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
8)	Data Arbiter	Semester	Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
9)	Data Konsiliator	Semester	Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
10)	Data Penutupan Perusahaan	Bulanan	Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
11)	Data Mogok Kerja	Bulanan	Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
12)	Data Mediator	Bulanan	Direktorat Bina Mediator Hubungan Industrial
13)	Data Tenaga Kerja terdampak Pemutusan Hubungan Kerja	Bulanan	Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

- b. Daftar Data Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang akan dikumpulkan oleh Produsen Data di Provinsi

NO.	NAMA DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN/ PENYERAHAN KE WALIDATA	PRODUSEN DATA
1)	Data Perusahaan yang menerapkan Struktur Skala Upah	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
2)	Data Peraturan Perusahaan yang disahkan	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
3)	Data Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi

NO.	NAMA DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN/ PENYERAHAN KE WALIDATA	PRODUSEN DATA
4)	Data Upah Minimum Provinsi	Tahunan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
5)	Data Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Tahunan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
6)	Data Perselisihan yang ditangani dan diselesaikan oleh Mediator	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
7)	Data Perselisihan yang ditangani dan diselesaikan oleh Arbiter dan Konsiliator	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
8)	Data Arbiter	Semester	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
9)	Data Konsiliator	Semester	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
10)	Data Mediator	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
11)	Data Tenaga Kerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi

- c. Daftar Data Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang akan dikumpulkan oleh Produsen Data di Kabupaten/Kota

NO.	NAMA DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN/ PENYERAHAN KE WALIDATA	PRODUSEN DATA
1)	Data Perusahaan yang menerapkan Struktur Skala Upah	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
2)	Data Peraturan Perusahaan yang disahkan	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
3)	Data Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota

NO.	NAMA DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN/ PENYERAHAN KE WALIDATA	PRODUSEN DATA
4)	Data Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Tahunan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
5)	Data Perselisihan yang ditangani dan diselesaikan oleh Mediator	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
6)	Data Mediator	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
7)	Data Tenaga Kerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja	Bulanan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota

4. Daftar Data Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang akan dikumpulkan oleh Produsen Data di Pusat dan Provinsi.

a. Daftar Data Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang akan dikumpulkan oleh Produsen Data di Pusat

NO.	NAMA DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN/ PENYERAHAN KE WALIDATA	PRODUSEN DATA
1)	Data Lembaga Pengawasan di Pusat dan Daerah	Tahunan	Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
2)	Data Perusahaan yang terdaftar di Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online	Triwulan	Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
3)	Data Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tahunan	Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4)	Data Perusahaan yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Triwulan	Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5)	Data Kader Norma Ketenagakerjaan	Triwulan	Direktorat Bina Kelembagaan

NO.	NAMA DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN/ PENYERAHAN KE WALIDATA	PRODUSEN DATA
			Keselamatan dan Kesehatan Kerja
6)	Data Perusahaan Penerima Penghargaan SMK3 (<i>Zero Accident</i>)	Tahunan	Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7)	Data Perusahaan Jasa K3	Semester	Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
8)	Data Ahli K3	Triwulan	Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
9)	Data Perusahaan yang diperiksa	Triwulan	Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
10)	Data Nota Pemeriksaan	Triwulan	Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
11)	Data Perusahaan yang Melanggar Tindak Pidana Ketenagakerjaan	Triwulan	Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
12)	Data Perusahaan yang disidik	Triwulan	Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
13)	Data Obyek K3	Triwulan	Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
14)	Data Pengawas Ketenagakerjaan	Semester	Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
15)	Data Penguji K3	Semester	Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- b. Daftar Data Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang akan dikumpulkan oleh Produsen Data di Provinsi

NO.	NAMA DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN/ PENYERAHAN KE WALIDATA	PRODUSEN DATA
1)	Data Lembaga Pengawasan di Pusat dan Daerah	Tahunan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
2)	Data Perusahaan yang terdaftar di WLKP <i>Online</i>	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
3)	Data Lembaga K3	Tahunan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
4)	Data Perusahaan yang Menerapkan SMK3	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
5)	Data Kader Norma Ketenagakerjaan	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
6)	Data Perusahaan Penerima Penghargaan SMK3 (<i>Zero Accident</i>)	Tahunan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
7)	Data Ahli K3	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
8)	Data Perusahaan yang diperiksa	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
9)	Data Nota Pemeriksaan	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
10)	Data Perusahaan yang Melanggar Tindak Pidana Ketenagakerjaan	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
11)	Data Perusahaan yang disidik	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
12)	Data Obyek K3	Triwulan	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
13)	Data Pengawas Ketenagakerjaan	Semester	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi

NO.	NAMA DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN/ PENYERAHAN KE WALIDATA	PRODUSEN DATA
14)	Data Penguji K3	Semester	Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi

B. Standar Data Ketenagakerjaan

1. Standar Data Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

NO.	NAMA DATA	KONSEP	DEFINISI	KLASIFIKASI	UKURAN	SATUAN	DASAR RUJUKAN
a.	Data Lembaga Pelatihan Kerja*	Lembaga Pelatihan Kerja Lembaga Pelatihan Kerja Terdaftar	Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. LPK Terdaftar adalah LPK yang terdaftar dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan serta telah memiliki <i>Vocational Identification Number</i> (VIN).	Type Metode Pelatihan, Kejuruan, Subkejuruan, Status Akreditasi, Mitra Kartu Prakerja Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker), Tipe Institusi, <i>Talent Corner</i> , Mitra Penyelenggara Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), <i>Sending Organization</i> (SO) Pemagangan Luar Negeri, Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI), Kios SIAP Kerja, Balai Pelatihan Profesional berstandar Internasional.	Jumlah	Lembaga	1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; 2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja; 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;

2. Standar Data Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

NO.	NAMA DATA	KONSEP	DEFINISI	KLASIFIKASI	UKURAN	SATUAN	DASAR RUJUKAN
a.	Data Kerja yang Ditempatkan oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)*	Tenaga Kerja yang Ditempatkan LPTKS	Tenaga Kerja yang Di tempatkan adalah bagian dari pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan LPTKS sebagai bagian dari sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan.	Jenis Kelamin, Pendidikan, Lapangan Usaha/ Bidang Pekerjaan, Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan.	Jumlah	Orang	1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja; 2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;

3. Standar Data Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

NO.	NAMA DATA	KONSEP	DEFINISI	KLASIFIKASI	UKURAN	SATUAN	DASAR RUJUKAN
a.	Data Perusahaan yang Memiliki Struktur Skala Upah*	Perusahaan Struktur dan Skala Upah Perusahaan yang Menerapkan Struktur Skala Upah	Perusahaan adalah: 1) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; 2) usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.	Status Permodalan, Status Perusahaan.	Jumlah	Perusahaan	a) Undang-Undang Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; b) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah; c) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;

NO.	NAMA DATA	KONSEP	DEFINISI	KLASIFIKASI	UKURAN	SATUAN	DASAR RUJUKAN
			<p>Struktur dan Skala Upah adalah Susunan Tingkat Upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat nilai kisaran upah dari yang terkecil maupun yang terendah dalam setiap golongan jabatan</p> <p>Perusahaan yang Menerapkan Struktur Skala Upah adalah perusahaan yang telah terdaftar dan melaporkannya dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan.</p>				

4. Standar Data Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

NO.	NAMA DATA	KONSEP	DEFINISI	KLASIFIKASI	UKURAN	SATUAN	DASAR RUJUKAN
a.	Data Perusahaan yang terdaftar di WLKP <i>Online</i> *	Perusahaan Perusahaan terdaftar <i>Online</i> Entitas Perusahaan terdaftar <i>Online</i>	Perusahaan adalah: 1) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik yang negara mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; 2) usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.	Skala Perusahaan, Status Permodalan, Lapangan Usaha/ Bidang Pekerjaan, Obyek K3, Status Perusahaan.	Jumlah	Perusahaan	a) Undang-Undang Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan; b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; c) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan; d) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;

NO.	NAMA DATA	KONSEP	DEFINISI	KLASIFIKASI	UKURAN	SATUAN	DASAR RUJUKAN
			<p>Perusahaan yang terdaftar di <i>WLKP Online</i> adalah Perusahaan dan/atau perusahaan dengan cabang-cabangnya yang telah terdaftar dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan dan memperoleh kode pendaftaran.</p> <p>Entitas Perusahaan terdaftar <i>WLKP Online</i> adalah bagian dari perusahaan terdaftar dalam <i>WLKP Online</i> yang meliputi perusahaan tanpa cabang atau perusahaan berstatus kantor pusat atau perusahaan berstatus kantor cabang atau perorangan sebagai obyek pengawasan ketenagakerjaan.</p>				

C. Metadata Data Ketenagakerjaan

1. Metadata Data Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

a. Metadata Kegiatan Data Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

METADATA STATISTIK KEGIATAN DATA LEMBAGA PELATIHAN KERJA* 2022			
Judul Kegiatan : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas			Tahun: 2022
Kode Kegiatan (diisi oleh petugas) :			
Cara Pengumpulan Data :			3
Pencacahan Lengkap	-1	Kompilasi Produk Administrasi	-3
Survei	-2	Cara lain sesuai dengan perkembangan TI	-4
Sektor Kegiatan :			13
Pertanian dan Perikanan	-1	Perdagangan Internasional dan Neraca Perdagangan	-12
Demografi dan Kependudukan	-2	Ketenagakerjaan	-13
Pembangunan	-3	Neraca Nasional	-14
Proyeksi Ekonomi	-4	Indikator Ekonomi Bulanan	-15
Pendidikan dan Pelatihan	-5	Produktivitas	-16
Lingkungan	-6	Harga dan Paritas Daya Beli	-17
Keuangan	-7	Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar	-18
Globalisasi	-8	Perwilayahan dan Perkotaan	-19
Kesehatan	-9	Ilmu Pengetahuan dan Hak Paten	-20
Industri dan Jasa	-10	Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan	-21
Teknologi Informasi dan Komunikasi	-11	Transportasi	-22
Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?			2
Ya	-1		
Tidak	-2		
Jika "Ya", Identitas Rekomendasi : ...			
A. PENYELENGGARA			
1. Instansi Penyelenggara : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia			
2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara : ... Telepon : ... Faksimili : ... e-Mail : ...			
B. PENANGGUNG JAWAB			
1. Unit Penanggung Jawab pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) : JPT Madya : Direktorat Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas JPT Pratama : Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi			
2. Penanggung Jawab Teknis : Jabatan : Koordinator Bidang Perizinan dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Alamat : ... Telepon : ... Faksimili : ... e-Mail : ...			
C. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN			
1. Latar Belakang : Diperlukan adanya regulasi untuk mengatur tata cara perizinan dan pendaftaran LPK.			
2. Tujuan Kegiatan : Untuk mengetahui Jumlah LPK yang terdaftar di Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan.			
3. Rencana Jadwal Kegiatan :			
Jadwal Kegiatan		Awal (Tgl-Bln-Thn)	Akhir (Tgl-Bln-Thn)
a. Perencanaan			
1) perencanaan kegiatan		1-1-20...	31-12-20...
2) desain		1-1-20...	31-12-20...
b. Pengumpulan			
3) pengumpulan data		1-1-20...	31-12-20...
c. Pemeriksaan			
4) pengelolaan data		1-1-20...	31-12-20...
d. Penyebarluasan			
5) analisis		1-1-20...	31-12-20...
6) diseminasi hasil		1-1-20...	31-12-20...
7) evaluasi		1-1-20...	31-12-20...

METADATA STATISTIK KEGIATAN DATA LEMBAGA PELATIHAN KERJA* 2022				
4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :				
No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
a.	Nama	Nama	Nama orang/Mentor Pemagangan/Kelompok/Instansi/Lembaga/ Penyelenggara Pemagangan/ Perusahaan/Badan Usaha lainnya sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspur/Akte Notaris/Izin Usaha/ Surat Keputusan (SK) Pejabat yang berwenang/Dokumen resmi negara lainnya	1 tahun
b.	VIN (<i>Vocational Identification Number</i>)	VIN	VIN adalah <i>Vocational Identity Number</i> , yaitu sebuah angka unik yang digunakan untuk memverifikasi kelengkapan data LPK agar dapat dimasukan pada layanan Sisnaker di kelembagaan.kemnaker.go.id	1 tahun
c.	Judul Program Pelatihan	Judul Program Pelatihan	Judul Program adalah judul program pelatihan yang ada pada layanan Sisnaker di proglat.kemnaker.go.id baik yang berstatus terbit maupun tutup/judul program pelatihan yang diikuti oleh peserta pelatihan berbasis kompetensi melalui layanan Sisnaker	1 tahun
d.	Tanggal Akreditasi	Tanggal Akreditasi	Tanggal akreditasi merupakan tanggal dokumen akreditasi LPK yang telah terverifikasi pada layanan Sisnaker di kelembagaan.kemnaker.go.id	1 tahun
e.	Provinsi	Provinsi	Provinsi adalah nama provinsi dimana lokasi wilayah kerja dari LPK yang tercantum pada layanan Sisnaker di kelembagaan.kemnaker.go.id	1 tahun
f.	Kapasitas Latih	Kapasitas Latih	Kapasitas Latih adalah jumlah orang maksimum yang dapat dilatih dalam 1 (satu) tahun untuk program pelatihan tertentu oleh LPK	1 tahun
g.	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota adalah nama kabupaten/kota dimana lokasi wilayah kerja dari LPK yang tercantum pada layanan Sisnaker di kelembagaan.kemnaker.go.id	1 tahun
h.	Masa Berlaku Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI)	Masa Berlaku FKLPI	Masa Berlaku FKLPI adalah waktu/tanggal yang menunjukkan informasi masa berlaku keanggotaan suatu LPK dalam FKLPI (diinput oleh administrator kelembagaan pusat)	1 tahun
i.	Kabupaten/Kota Skill Development Center (SDC) Binaan Balai Latihan Kerja (BLK)	Kabupaten/Kota SDC Binaan BLK	Kabupaten/Kota SDC Binaan BLK adalah nama kabupaten/kota dimana suatu LPK memiliki SDC (diinput oleh administrator kelembagaan pusat)	1 tahun
j.	Sertifikasi Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO)	Sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO adalah nomor sertifikat ISO yang dimiliki oleh suatu LPK (diinput oleh administrator kelembagaan pusat)	1 tahun
k.	Tipe Lembaga	Tipe Lembaga	Tipe Lembaga adalah tipe lembaga yang telah didefinisikan pada layanan Sisnaker di kelembagaan.kemnaker.go.id	1 tahun
l.	Metode Program Pelatihan		Metode adalah nama jenis metode penyelenggaraan suatu program pelatihan pada layanan Sisnaker di proglat.kemnaker.go.id	1 tahun
m.	Kejuruan		Kejuruan adalah nama jenis kejuruan yang tercantum pada layanan Sisnaker	1 tahun
n.	Subkejuruan		Subkejuruan adalah nama jenis subkejuruan yang tercantum pada layanan Sisnaker	1 tahun

METADATA STATISTIK KEGIATAN DATA LEMBAGA PELATIHAN KERJA* 2022				
o.	Status Akreditasi	Status Akreditasi	Status Akreditasi adalah status pengakuan LPK yang telah terverifikasi pada layanan Sisnaker yaitu yang telah memenuhi persyaratan melakukan kegiatan pelatihan kerjamemenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja.	1 tahun
p.	Mitra Kartu Prakerja Sisnaker	Mitra Kartu Prakerja Sisnaker	Mitra kartu Prakerja Sisnaker adalah informasi yang menunjukkan suatu LPK merupakan lembaga mitra penyelenggaraan program Kartu Prakerja melalui platform Sisnaker (diinput oleh administrator kelembagaan pusat)	1 tahun
q.	Tipe Institusi	Tipe Institusi	Tipe institusi adalah tipe dari LPK yang menyelenggarakan pelatihan kerja sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016	1 tahun
r.	Talent Corner	Talent Corner	Talent Corner adalah informasi yang menunjukkan bahwa suatu LPK pemerintah pusat memiliki sarana dan prasarana talent corner atau tidak (diinput oleh administrator kelembagaan pusat)	1 tahun
s.	Mitra Penyelenggara JKP	Mitra Penyelenggara JKP	Mitra Penyelenggaraan JKP adalah informasi yang menunjukkan suatu LPK merupakan lembaga mitra penyelenggaraan program JKP melalui platform Sisnaker (diinput oleh administrator kelembagaan pusat)	1 tahun
t.	Sending Organization (SO) Pemagangan Luar Negeri	SO Pemagangan Luar Negeri	SO Pemagangan Luar Negeri adalah informasi yang menunjukkan bahwa suatu lembaga pelatihan yang terverifikasi dan terakreditasi pada layanan Sisnaker adalah LPK yang juga berstatus sebagai SO pemagangan luar negeri (diinput oleh administrator kelembagaan pusat)	1 tahun
u.	Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI)	FKLPI	FKLPI adalah informasi yang menunjukkan bahwa suatu LPK yang terverifikasi pada layanan Sisnaker adalah LPK yang juga terlibat dalam FKLPI (diinput oleh administrator kelembagaan pusat)	1 tahun
v.	Kios SIAP Kerja	Kios SIAP Kerja	Kios Siap Kerja adalah informasi yang menunjukkan suatu LPK memiliki unit Kios Siap Kerja atau tidak (diinput oleh administrator kelembagaan pusat)	1 tahun
w.	Balai Pelatihan Profesional Berstandar Internasional	Balai Pelatihan Profesional Berstandar Internasional	Balai Pelatihan Profesional Berstandar Internasional adalah informasi yang menunjukkan suatu LPK berstandar internasional atau tidak (diinput oleh administrator kelembagaan pusat)	1 tahun
D. DESAIN KEGIATAN				
1. Kegiatan ini dilakukan :				2
Hanya sekali (langsung ke angka 3)		-1	Berulang	-2
2. Jika "berulang" (sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkode -2), Frekuensi Penyelenggaraan :				6
Harian		-1	Empat Bulanan	-5
Mingguan		-2	Semesteran	-6
Bulanan		-3	Tahunan	-7
Triwulan		-4	> Dua Tahunan	-8
3. Tipe Pengumpulan Data :				3
Longitudinal Panel			-1	
Longitudinal Cross Section			-2	
Cross Sectional			-3	
4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data :				1
Seluruh Wilayah Indonesia			-1	
Sebagian Wilayah Indonesia			-2	

METADATA STATISTIK KEGIATAN DATA LEMBAGA PELATIHAN KERJA* 2022			
5. Jika "sebagian wilayah Indonesia" (sebagaimana dimaksud pada angka 4 berkode -2),, Wilayah Kegiatan :			
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	
a.			
b.			
c.			
d.	...dst		
6. Metode Pengumpulan Data :			8
Wawancara		-1	
Mengisi kuesioner sendiri (swacakah)		-2	
Pengamatan (observasi)		-3	
Pengumpulan Data sekunder		-4	
Lainnya (sebutkan) ...		-16	
7. Sarana Pengumpulan Data :			2
<i>Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)</i>		-1	
<i>Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)</i>		-2	
<i>Computer-assisted Telephones Interviewing (CATI)</i>		-4	
<i>Computer Aided Web Interviewing (CAWI)</i>		-8	
<i>Mail</i>		-16	
Lainnya (sebutkan) ...		-32	
8. Unit Pengumpul Data :			8
Individu		-1	
Rumah Tangga		-2	
Usaha/perusahaan		-4	
Lainnya (sebutkan) ...		-8	
E. DESAIN SAMPEL (diisi jika cara pengumpulan Data merupakan survey sebagian)			
1. Jenis Rancangan Sampel :			-
<i>Single Stage/Fase</i>		-1	
<i>Multi Stage/Fase</i>		-2	
2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:			-
Sampel Probabilitas		-1 -> ke angka 3 huruf a	
Sampel Nonprobabilitas		-2 -> ke angka 3 huruf b	
3. a. Jika "sampel probabilitas" (sebagaimana dimaksud pada angka 2), Metode yang Digunakan :			-
<i>Simple Random Sampling</i>		-1	
<i>Systematic Random Sampling</i>		-2	
<i>Stratified Random Sampling</i>		-3 -> ke angka 4	
<i>Cluster Sampling</i>		-4	
<i>Multi Stage Sampling</i>		-5	
b. Jika "sampel nonprobabilitas" (R.5.2. berkode 2), Metode yang Digunakan :			
<i>Quota Sampling</i>		-6	
<i>Accidental Sampling</i>		-7	
<i>Purposive Sampling</i>		-8 -> ke angka 7	
<i>Snowball Sampling</i>		-9	
<i>Saturation Sampling</i>		-10	
4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir :			-
<i>List Frame</i>		-1	
<i>Area Frame</i>		-2	
5. Fraksi Sampel Keseluruhan :			-
6. Nilai Perkiraan <i>Sampling Error</i> Variabel Utama :			-
7. Unit Sampel :			-
8. Unit Observasi :			-
F. PENGUMPULAN DATA			
1. Apakah Melakukan Uji Coba (<i>Pilot Survey</i>)?			2
Ya		-1	
Tidak		-2	
2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data :			2
Kunjungan kembali (<i>revisit</i>)	-1	<i>Task Force</i>	-4
Supervisi	-2	Lainnya (sebutkan) ...	-8
3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?			2
Ya		-1	
Tidak		-2	
Pertanyaan angka 4 sampai dengan angka 7 ditanyakan jika sarana pengumpulan data melalui PAPI, CAPI, atau CATI (sebagaimana dimaksud dalam Huruf D angka 7)			

METADATA STATISTIK KEGIATAN DATA LEMBAGA PELATIHAN KERJA* 2022				
4.	Petugas Pengumpulan Data :			1
	Staf instansi penyelenggara	-1		
	Mitra/tenaga kontrak	-2		
	Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak	-3		
5.	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data :			2
	≤ SMP	-1		
	SMA/SMK	-2		
	Diploma I/II/III	-3		
	Diploma IV/S1/S2/S3	-4		
6.	Jumlah Petugas :			
	Supervisor/penyelia/pengawas	1 (satu) orang		
	Pengumpul Data/enumerator	1 (satu) orang		
7.	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?			1
	Ya	-1		
	Tidak	-2		
G. PENGOLAHAN DAN ANALISIS				
1.	Tahapan Pengolahan Data :			
	Penyuntingan (<i>Editing</i>)	Ya -1	Tidak -2	1
	Penyandian (<i>Coding</i>)	Ya -1	Tidak -2	1
	Data Entry	Ya -1	Tidak -2	1
	Penyahihan (Validasi)	Ya -1	Tidak -2	1
2.	Metode Analisis :			1
	Deskriptif	-1		
	Inferensia	-2		
	Deskriptif dan Inferensia	-3		
3.	Unit Analisis :			8
	Individu	-1	Usaha/Perusahaan -4	
	Rumah Tangga	-2	Lainnya (sebutkan) ... -8	
4.	Tingkat Penyajian Hasil Analisis :			1
	Nasional	-1	Kecamatan -8	
	Provinsi	-2	Lainnya (sebutkan) ... -16	
	Kabupaten	-4		
H. DISEMINASI HASIL				
1.	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum :			
	Tercetak (<i>hardcopy</i>)	Ya -1	Tidak -2	1
	Digital (<i>softcopy</i>)	Ya -1	Tidak -2	1
	Data Mikro	Ya -1	Tidak -2	1
2.	Jika pilihan pada angka 1 dengan kode -1, maka Rencana Rilis Produk Kegiatan :			
	Hasil	Tanggal – Bulan - Tahun		
	Tercetak (<i>hardcopy</i>)	1 – Maret – 20...		
		1 – Agustus – 20...		
	Digital (<i>softcopy</i>)	1 – Maret – 20...		
		1 – Agustus – 20...		
	Data Mikro	1 – Maret – 20...		
		1 – Agustus – 20...		

b. Metadata Variabel Data Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Metadata Statistik Variabel Data Lembaga Pelatihan Kerja* 2022											
Keterangan Kegiatan Statistik											
Nama Kegiatan:		Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas		Instansi:		Kementerian Ketenagakerjaan		Republik			
Kode Kegiatan: (diisi oleh petugas)		-		Penyelenggara		Unit Kerja Eselon I:					
						Unit Kerja Eselon II:					
						Unit Kerja Eselon III:					
NO.	NAMA VARIABEL	ALIAS	KONSEP	DEFINISI	REFERENSI PEMILIHAN	REFERENSI WAKTU	TIPE DATA	KLASIFIKASI ISIAN	ATURAN VALIDASI	KALIMAT PERTANYAAN	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya -1 Tidak -2
1.	(i) Nama	(ii) (iii)	(iv) Nama	(v) Nama orang/mentor pemagangan/kelompok/instansi/lembaga/penyelenggara perusahaan/badan usaha lainnya sesuai yang tertera pada kartu tanda penduduk/paspor/akte notaris/izin usaha/surat keputusan pejabat yang berwenang/dokumen resmi negara lainnya	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)
2.	VIN (Vocational Identification Number)		VIN	VIN adalah Vocational Identity Number, yaitu sebuah angka unik yang digunakan untuk memverifikasi kelengkapan data lembaga pelatihan kerja agar dapat dimasukkan pada layanan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan laman https://kelembagaan.kemnaker.go.id							

NO.	NAMA VARIABEL	ALIAS	KONSEP	DEFINISI	REFERENSI PEMILIHAN	REFERENSI WAKTU	TIPE DATA	KLASIFIKASI ISIAN	ATURAN VALIDASI	KALIMAT PERTANYAAN	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya -1 Tidak -2
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)
3.	Judul Program Pelatihan		Judul Program Pelatihan	Judul Program adalah judul program pelatihan yang ada pada layanan Sisnaker dengan laman https://proglat.kemnaker.go.id baik yang berstatus terbit maupun tutup/judul program pelatihan yang diikuti oleh peserta pelatihan berbasis kompetensi melalui layanan Sisnaker							
4.	Tanggal Akreditasi		Tanggal Akreditasi	Tanggal akreditasi merupakan tanggal dokumen akreditasi lembaga pelatihan kerja yang telah terverifikasi pada layanan Sisnaker dengan laman https://kelembagaan.kemnaker.go.id							
5.	Provinsi		Provinsi	Provinsi adalah nama provinsi dimana lokasi wilayah kerja dari lembaga pelatihan kerja yang tercantum pada layanan Sisnaker dengan laman https://kelembagaan.kemnaker.go.id				1. Jawa Barat 2. Jawa Tengah 3. Bali 4. Lampung 5. Sumatera Barat 6. ...dst... 3-4. Kalimantan Utara			
6.	Kapasitas Latih		Kapasitas Latih	Kapasitas Latih adalah jumlah orang maksimum yang dapat dilatih dalam satu tahun untuk program pelatihan tertentu oleh lembaga pelatihan kerja							
7.	Kabupaten/kota		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota adalah nama kabupaten/kota dimana lokasi wilayah kerja dari lembaga pelatihan kerja yang tercantum pada layanan Sisnaker dengan laman https://kelembagaan.kemnaker.go.id				1. Kabupaten Cianjur 2. Kota Bekasi 3. Kota Salatiga 4. Kabupaten Rembang 5. Kabupaten Buleleng 6.dst...			

NO.	NAMA VARIABEL	ALIAS	KONSEP	DEFINISI	REFERENSI PEMILIHAN	REFERENSI WAKTU	TIPE DATA	KLASIFIKASI ISIAN	ATURAN VALIDASI	KALIMAT PERTANYAAN	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya -1 Tidak -2
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)
8.	Masa Berlaku Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI)		Masa Berlaku FKLPI	Masa berlaku FKLPI adalah waktu/tanggal yang menunjukkan informasi masa berlaku keanggotaan suatu lembaga pelatihan kerja dalam FKLPI (diinput oleh administrator kelembagaan pusat)				385. Kabupaten Aceh Singkil			
9.	Kabupaten/Kota <i>Skill Development Center</i> (SDC) Binaan Balai Kerja (BLK)		Kabupaten/Kota a SDC Binaan BLK	Kabupaten/Kota SDC Binaan BLK adalah nama kabupaten/kota dimana suatu lembaga pelatihan kerja memiliki SDC (diinput oleh administrator kelembagaan pusat)							
10.	Sertifikasi Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO)		Sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO adalah nomor sertifikat ISO yang dimiliki oleh suatu lembaga pelatihan kerja (diinput oleh administrator kelembagaan pusat)							
11.	Type Lembaga		Type Lembaga	Type Lembaga adalah tipe lembaga yang telah didefinisikan pada layanan Sisnaker dengan laman https://kelembagaan.kemnaker.go.id				1. LPK Swasta 2. BLK Komunitas 3. BLK Luar Negeri 4. BLK Unit Pelayanan Terpadu Pusat 5. Lembaga Pelatihan Kementerian/Lembaga 6. BLK Unit Pelayanan Terpadu Daerah 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)			

NO.	NAMA VARIABEL	ALIAS	KONSEP	DEFINISI	REFERENSI PEMILIHAN	REFERENSI WAKTU	TIBE DATA	KLASIFIKASI ISIAN	ATURAN VALIDASI	KALIMAT PERTANYAAN	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya -1 Tidak -2	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	
12.	Metode Program Pelatihan			Metode adalah nama jenis metode penyelenggaraan suatu program pelatihan pada layanan Sisnaker dengan laman https://proglat.kemnaker.go.id				1. <i>Blended</i> 2. <i>Online</i> 3. <i>Offline</i>				
13.	Kejuruan			Kejuruan adalah nama jenis kejuruan yang tercantum pada layanan Sisnaker				1. Pariwisata 2. Bisnis Dan Manajemen 3. <i>Processing</i> 4. Teknik Otomotif 5. Teknologi Informasi dan Komunikasi 6. ... <i>dst...</i> 34. Pengolahan Kulit				
14.	Subkejuruan			Subkejuruan adalah nama jenis subkejuruan yang tercantum pada layanan Sisnaker				1. Perhotelan 2. Bahasa 3. Pengolahan Hasil Pertanian 4. Teknik Sepeda Motor 5. Administrasi Perkantoran 6. ... <i>dst...</i> 103. Pekerjaan Gypsum				
15.	Status Akreditasi		Status Akreditasi	Status Akreditasi adalah status pengakuan lembaga pelatihan kerja yang telah terverifikasi pada layanan Sisnaker yaitu yang telah memenuhi persyaratan melakukan kegiatan pelatihan kerjamemenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja				1. Terakreditasi 2. Belum Terakreditasi				

NO.	NAMA VARIABEL	ALIAS	KONSEP	DEFINISI	REFERENSI PEMILIHAN	REFERENSI WAKTU	TIPE DATA	KLASIFIKASI ISIAN	ATURAN VALIDASI	KALIMAT PERTANYAAN	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya -1 Tidak -2
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)
16.	Mitra Prakerja Sisnaker		Mitra Prakerja Sisnaker	Mitra Kartu Prakerja Sisnaker adalah informasi yang menunjukkan suatu lembaga pelatihan kerja merupakan lembaga mitra penyelenggaraan program Kartu Prakerja melalui platform Sisnaker (diinput oleh administrator kelembagaan pusat)				1. Ya 2. Tidak			
17.	Tipe Institusi		Tipe Institusi	Tipe institusi adalah tipe dari lembaga pelatihan kerja yang menyelenggarakan pelatihan kerja sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016				1. Government 2. Private 3. Industrial			
18.	Talent Corner		Talent Corner	Talent corner adalah informasi yang menunjukkan bahwa suatu lembaga pelatihan kerja pemerintah pusat memiliki sarana dan prasarana talent corner atau tidak (diinput oleh administrator kelembagaan pusat)				1. Ya 2. Tidak			
19.	Mitra Penyelenggara JKP		Mitra Penyelenggara JKP	Mitra Penyelenggara JKP adalah informasi yang menunjukkan suatu lembaga pelatihan kerja merupakan lembaga mitra penyelenggaraan program JKP melalui platform Sisnaker (diinput oleh administrator kelembagaan pusat)				1. Ya 2. Tidak			
20.	Sending Organization (SO) Pemagangan Luar Negeri		SO Pemagangan Luar Negeri	SO Pemagangan Luar Negeri adalah informasi yang menunjukkan bahwa suatu lembaga pelatihan yang terverifikasi dan terakreditasi pada				1. Ya 2. Tidak			

NO.	NAMA VARIABEL	ALIAS	KONSEP	DEFINISI	REFERENSI PEMILIHAN	REFERENSI WAKTU	TIPE DATA	KLASIFIKASI ISI/AN	ATURAN VALIDASI	KALIMAT PERTANYAAN	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya -1 Tidak -2
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)
21.	Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI)		FKLPI	layanan Sisnaker adalah lembaga pelatihan kerja yang juga berstatus sebagai SO pemagangan luar negeri (diinput oleh administrator kelembagaan pusat) FKLPI adalah informasi yang menunjukkan bahwa suatu lembaga pelatihan kerja yang terverifikasi pada layanan Sisnaker adalah lembaga pelatihan kerja yang juga terlibat dalam FKLPI (diinput oleh administrator kelembagaan pusat)				1. Ya 2. Tidak			
22.	Kios SIAP Kerja		Kios SIAP Kerja	Kios Siap Kerja adalah informasi yang menunjukkan suatu lembaga pelatihan kerja memiliki unit Kios Siap Kerja atau tidak (diinput oleh administrator kelembagaan pusat)				1. Ya 2. Tidak			
23.	Balai Pelatihan Profesional berstandar Internasional		Balai Pelatihan Profesional berstandar Internasional	Balai Pelatihan Profesional Berstandar Internasional adalah informasi yang menunjukkan suatu lembaga pelatihan kerja berstandar internasional atau tidak (diinput oleh administrator kelembagaan pusat)				1. Ya 2. Tidak			

2. Metadata Data Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

a. Metadata Kegiatan Data Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

METADATA STATISTIK KEGIATAN DATA TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN OLEH LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS)* 2022			
Judul Kegiatan : Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri		Tahun: 2022	
Kode Kegiatan (diisi oleh petugas) :			
Cara Pengumpulan Data :			3
Pencacahan Lengkap	-1	Kompilasi Produk Administrasi	-3
Survei	-2	Cara lain sesuai dengan perkembangan TI	-4
Sektor Kegiatan :			13
Pertanian dan Perikanan	-1	Perdagangan Internasional dan Neraca Perdagangan	-12
Demografi dan Kependudukan	-2	Ketenagakerjaan	-13
Pembangunan	-3	Neraca Nasional	-14
Proyeksi Ekonomi	-4	Indikator Ekonomi Bulanan	-15
Pendidikan dan Pelatihan	-5	Produktivitas	-16
Lingkungan	-6	Harga dan Paritas Daya Beli	-17
Kuangan	-7	Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar	-18
Globalisasi	-8	Perwilayahan dan Perkotaan	-19
Kesehatan	-9	Ilmu Pengetahuan dan Hak Paten	-20
Industri dan Jasa	-10	Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan	-21
Teknologi Informasi dan Komunikasi	-11	Transportasi	-22
Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?			2
Ya	-1		
Tidak	-2		
Jika "Ya", Identitas Rekomendasi : ...			
A. PENYELENGGARA			
1. Instansi Penyelenggara : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia			
2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara : ... Telepon : ... Faksimili : ... e-Mail : ...			
B. PENANGGUNG JAWAB			
1. Unit Penanggung Jawab pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) : JPT Madya : Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja JPT Pratama : Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri			
2. Penanggung Jawab Teknis : Jabatan : Koordinator ... Alamat : ... Telepon : ... Faksimili : ... e-Mail : ...			
C. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN			
1. Latar Belakang :			
2. Tujuan Kegiatan : Untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang ditempatkan mengisi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja melalui lembaga penempatan tenaga kerja swasta di Indonesia.			
3. Rencana Jadwal Kegiatan :			
Jadwal Kegiatan		Awal (Tgl-Bln-Thn)	Akhir (Tgl-Bln-Thn)
a. Perencanaan			
1) perencanaan kegiatan		1-1-20...	31-12-20...
2) desain		1-1-20...	31-12-20...
b. Pengumpulan			
3) pengumpulan data		1-1-20...	31-12-20...
c. Pemeriksaan			
4) pengelolaan data		1-1-20...	31-12-20...
d. Penyebarluasan			
5) analisis		1-1-20...	31-12-20...

METADATA STATISTIK KEGIATAN DATA TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN OLEH LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS)* 2022				
6) diseminasi hasil		1-1-20...		31-12-20...
7) evaluasi		1-1-20...		31-12-20...
4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :				
No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
a.	Nama	Nama	nama orang/mentor pemagangan/ kelompok/instansi/lembaga/penyelenggara pemagangan/perusahaan/badan usaha lainnya sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/paspor/akte notaris/izin usaha/surat keputusan (sk) pejabat yang berwenang/dokumen resmi negara lainnya	1 tahun
b.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	NIK	Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia	1 tahun
c.	Nomor Telepon/ Telepon Genggam/ Faksimili	Nomor Telepon/ Telepon Genggam/ Faksimili	Nomor Telepon/Telepon Genggam/ Faksimili orang/mentor/pemagangan/ kelompok/instansi/lembaga/penyelenggara pemagangan/perusahaan dan lainnya yang terdiri dari digit angka	1 tahun
d.	Surel	Surel	Nama Surel adalah nama surat elektronik yang digunakan yang terdiri dari nama lokal, simbol @, dan nama domain	1 tahun
e.	Alamat	Alamat	alamat orang/instansi/lembaga/ penyelenggara pemagangan/perusahaan/ badan usaha lainnya sesuai yang tertera pada kartu tanda penduduk/paspor/akte notaris/izin usaha/surat keputusan pejabat yang berwenang/dokumen resmi negara lainnya yang memuat nama jalan, nomor bangunan, nama kelurahan atau kecamatan, nama kabupaten/kota, nama provinsi, nama Negara, dan kode pos	1 tahun
f.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB	identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran	1 tahun
g.	Gaji/Upah yang Diterima	Gaji/Upah yang Diterima	Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan	1 tahun
h.	Lokasi Kerja/Usaha	Lokasi Kerja/Usaha	nama jalan/desa/kelurahan/kecamatan/ kabupaten/kota/provinsi/negara tempat usaha/kerja	1 tahun
i.	Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan	Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan	jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada jabatan/lowongan pekerjaan/perusahaan	1 tahun
j.	Nama Jabatan	Nama Jabatan	nama jabatan merupakan posisi/ kedudukan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan	1 tahun
k.	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Mulai Bekerja	1 tahun
l.	Provinsi	Provinsi	Provinsi adalah nama provinsi dimana lokasi wilayah kerja dari lembaga pelatihan kerja yang tercantum pada layanan Sisnaker di kelembagaan.kemnaker.go.id	1 tahun
m.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	NPWP	NPWP adalah nomor tanda wajib pajak sebagai identitas dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan	1 tahun

METADATA STATISTIK KEGIATAN DATA TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN OLEH LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS)* 2022				
n.	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota adalah nama kabupaten/kota dimana lokasi wilayah kerja dari lembaga pelatihan kerja yang tercantum pada layanan Sisnaker di kelembagaan.kemnaker.go.id	1 tahun
o.	Nomor Pelaporan Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP)	Nomor Pelaporan Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP)	nomor pelaporan yang muncul setelah membuat laporan WLKP secara <i>online</i>	1 tahun
p.	Nama Jabatan (sesuai Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia)	Nama Jabatan (sesuai Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia)	nama jabatan (sesuai Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia)	1 tahun
q.	Persyaratan Jabatan	Persyaratan Jabatan	persyaratan jabatan	1 tahun
r.	Asal Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Asal LPTKS	asal LPTKS	1 tahun
s.	Jenis Kelamin	Jenis kelamin	Jenis Kelamin adalah laki laki atau perempuan	1 tahun
t.	Pendidikan	Pendidikan	Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah	1 tahun
u.	Lapangan Usaha/ Bidang Pekerjaan	Lapangan Usaha/Bidang Pekerjaan	Lapangan Usaha / Bidang Pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat kepala rumah tangga/anggota rumah tangga bekerja	1 tahun
v.	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	1 tahun
D. DESAIN KEGIATAN				
1. Kegiatan ini dilakukan :				2
Hanya sekali (langsung ke angka 3)		-1	Berulang	-2
2. Jika "berulang" (sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkode -2), Frekuensi Penyelenggaraan :				4
Harian		-1	Empat Bulanan	-5
Mingguan		-2	Semesteran	-6
Bulanan		-3	Tahunan	-7
Triwulan		-4	> Dua Tahunan	-8
3. Tipe Pengumpulan Data :				3
<i>Longitudinal Panel</i>		-1		
<i>Longitudinal Cross Section</i>		-2		
<i>Cross Sectional</i>		-3		
4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data :				1
Seluruh Wilayah Indonesia		-1		
Sebagian Wilayah Indonesia		-2		
5. Jika "sebagian wilayah Indonesia" (sebagaimana dimaksud pada angka 4 berkode -2), Wilayah Kegiatan :				
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota		
a.				
b.				
c.				
d.	...dst			
6. Metode Pengumpulan Data :				8
Wawancara		-1		
Mengisi kuesioner sendiri (swacakah)		-2		
Pengamatan (observasi)		-3		
Pengumpulan Data sekunder		-4		
Lainnya (sebutkan) ...		-16		
7. Sarana Pengumpulan Data :				2
<i>Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)</i>		-1		
<i>Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)</i>		-2		
<i>Computer-assisted Telephones Interviewing (CATI)</i>		-4		
<i>Computer Aided Web Interviewing (CAWI)</i>		-8		
<i>Mail</i>		-16		
Lainnya (sebutkan) ...		-32		

METADATA STATISTIK KEGIATAN DATA TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN OLEH LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS)* 2022			
8.	Unit Pengumpul Data :		8
	Individu	-1	
	Rumah Tangga	-2	
	Usaha/perusahaan	-4	
	Lainnya (sebutkan) ...	-8	
E. DESAIN SAMPEL (diisi jika cara pengumpulan Data merupakan survey sebagian)			
1.	Jenis Rancangan Sampel :		-
	Single Stage/Fase	-1	
	Multi Stage/Fase	-2	
2.	Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:		-
	Sampel Probabilitas	-1 -> ke angka 3 huruf a	
	Sampel Nonprobabilitas	-2 -> ke angka 3 huruf b	
3.	a. Jika "sampel probabilitas" (sebagaimana dimaksud pada angka 2), Metode yang Digunakan :		-
	Simple Random Sampling	-1	
	Systematic Random Sampling	-2	
	Stratified Random Sampling	-3 -> ke angka 4	
	Cluster Sampling	-4	
	Multi Stage Sampling	-5	
	b. Jika "sampel nonprobabilitas" (R.5.2. berkode 2), Metode yang Digunakan :		
	Quota Sampling	-6	
	Accidental Sampling	-7	
	Purposive Sampling	-8 -> ke angka 7	
	Snowball Sampling	-9	
	Saturation Sampling	-10	
4.	Kerangka Sampel Tahap Terakhir :		-
	List Frame	-1	
	Area Frame	-2	
5.	Fraksi Sampel Keseluruhan :		
	-		
6.	Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama :		
	-		
7.	Unit Sampel :		
	-		
8.	Unit Observasi :		
	-		
F. PENGUMPULAN DATA			
1.	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?		2
	Ya	-1	
	Tidak	-2	
2.	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data :		8
	Kunjungan kembali (revisit)	-1	Task Force -4
	Supervisi	-2	Lainnya (sebutkan) ... -8
3.	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		2
	Ya	-1	
	Tidak	-2	
Pertanyaan angka 4 sampai dengan angka 7 ditanyakan jika sarana pengumpulan data melalui PAPI, CAPI, atau CATI (sebagaimana dimaksud dalam Huruf D angka 7)			
4.	Petugas Pengumpulan Data :		1
	Staf instansi penyelenggara	-1	
	Mitra/tenaga kontrak	-2	
	Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak	-3	
5.	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data :		2
	≤ SMP	-1	
	SMA/SMK	-2	
	Diploma I/II/III	-3	
	Diploma IV/S1/S2/S3	-4	
6.	Jumlah Petugas :		
	Supervisor/penyelia/pengawas	1 (satu) orang	
	Pengumpul Data/enumerator	1 (satu) orang	
7.	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?		1
	Ya	-1	
	Tidak	-2	
G. PENGOLAHAN DAN ANALISIS			
1.	Tahapan Pengolahan Data :		
	Penyuntingan (Editing)	Ya -1	Tidak -2
	Penyandian (Coding)	Ya -1	Tidak -2
	Data Entry	Ya -1	Tidak -2
	Penyahihan (Validasi)	Ya -1	Tidak -2

METADATA STATISTIK KEGIATAN DATA TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN OLEH LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS)* 2022			
2. Metode Analisis :			1
Deskriptif	-1		
Inferensia	-2		
Deskriptif dan Inferensia	-3		
3. Unit Analisis :			8
Individu	-1	Usaha/Perusahaan	-4
Rumah Tangga	-2	Lainnya (sebutkan) ...	-8
4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis :			1
Nasional	-1	Kecamatan	-8
Provinsi	-2	Lainnya (sebutkan) ...	-16
Kabupaten	-4		
H. DISEMINASI HASIL			
1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum :			
Tercetak (<i>hardcopy</i>)	Ya -1	Tidak -2	1
Digital (<i>softcopy</i>)	Ya -1	Tidak -2	1
Data Mikro	Ya -1	Tidak -2	2
2. Jika pilihan pada angka 1 dengan kode -1, maka Rencana Rilis Produk Kegiatan :			
Hasil	Tanggal - Bulan - Tahun		
Tercetak (<i>hardcopy</i>)	1 - Maret - 20...		
	1 - Agustus - 20...		
Digital (<i>softcopy</i>)	1 - Maret - 20...		
	1 - Agustus - 20...		
Data Mikro			

b. Metadata Variabel Data Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Metadata Statistik Variabel Data Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)* 2022											
Keterangan Kegiatan Statistik											
Nama Kegiatan:		Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri			Instansi:		Kementerian Ketenagakerjaan		Republik		
					Indonesia						
Kode Kegiatan: (diisi oleh petugas)		00			Penyelenggara		Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja		Penempatan Tenaga Kerja		
							Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri				
					Unit Kerja Eselon III:		Koordinator Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja		Kelembagaan		
NO.	NAMA VARIABEL	ALIAS	KONSEP	DEFINISI	REFRENSI PEMILIHAN	REFRENSI WAKTU	TIPE DATA	KLASIFIKASI ISIAN	ATURAN VALIDASI	KALIMAT PERTANYAAN	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya -1 Tidak -2
1.	Nama	(ii) (iii)	(iv) Nama	(v) nama orang/mentor pemagangan/kelompok/instansi/lembaga/penyelenggara pemagangan/perusahaan/badan usaha lainnya sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/paspor/akte notaris /izin usaha/surat keputusan (SK) pejabat yang berwenang/dokumen resmi negara lainnya	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)
2.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)		NIK	Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia							

NO.	NAMA VARIABEL	ALIAS	KONSEP	DEFINISI	REFERENSI PEMILIHAN	REFERENSI WAKTU	TIPE DATA	KLASIFIKASI ISIAN	ATURAN VALIDASI	KALIMAT PERTANYAAN	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya -1 Tidak -2
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)
3.	Nomor Telepon/ Telepon Genggam/ Faksimili		Nomor Telepon/ Telepon Genggam/ Faksimili	Nomor Telepon/Telepon Genggam/ Faksimili orang/mentor/pemagangan /kelompok/instansi/lembaga/penyel enggara pemagangan/perusahaan dan lainnya yang terdiri dari digit angka	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	
4.	Surel		Surel	Nama Surel adalah nama surat elektronik yang digunakan yang terdiri dari nama lokal, simbol @, dan nama domain							
5.	Alamat		Alamat	alamat orang/instansi/lembaga/ penyelenggara pemagangan/ perusahaan/badan usaha lainnya sesuai yang tertera pada kartu tanda penduduk/paspor/akte notaris/izin usaha/surat keputusan pejabat yang berwenang/dokumen resmi negara lainnya yang memuat nama jalan, nomor bangunan, nama kelurahan atau kecamatan, nama kabupaten/kota, nama provinsi, nama Negara, dan kode pos							
6.	Nomor Induk Berusaha (NIB)		NIB	identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran							
7.	Gaji/Upah yang Diterima		Gaji/Upah yang Diterima	Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada							

NO.	NAMA VARIABEL	ALIAS	KONSEP	DEFINISI	REFRENSI PEMILIHAN	REFRENSI WAKTU	TIPE DATA	KLASIFIKASI ISIAN	ATURAN VALIDASI	KALIMAT PERTANYAAN	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya -1 Tidak -2
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)
				pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan							
8.	Lokasi Kerja/Usaha		Lokasi Kerja/Usaha	nama jalan/desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/negara tempat usaha/kerja							
9.	Jumlah tenaga yang dibutuhkan		Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan	jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada jabatan/lowongan pekerjaan/perusahaan							
10.	Nama Jabatan		Nama Jabatan	nama jabatan merupakan posisi/ kedudukan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan							
11.	Tanggal Mulai Bekerja		Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Mulai Bekerja							
12.	Provinsi		Provinsi	Provinsi adalah nama provinsi dimana lokasi wilayah kerja dari lembaga pelatihan kerja yang tercantum pada layanan Sismaker di kelebagaan.kemnaker.go.id				1. Jawa Barat 2. Jawa Tengah 3. Bali 4. Lampung 5. Sumatera Barat 6. ...dst... 34. Kalimantan Utara			
13.	Nomor Wajib Pajak (NPWP)		NPWP	NPWP adalah nomor tanda wajib pajak sebagai identitas dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan							

NO.	NAMA VARIABEL	ALIAS	KONSEP	DEFINISI	REFERENSI PEMILIHAN	REFERENSI WAKTU	TIPE DATA	KLASIFIKASI ISIAN	ATURAN VALIDASI	KALIMAT PERTANYAAN	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya - 1 Tidak - 2
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)
14.	Kabupaten/kota		Kabupaten/Kota	Kabupaten/kota adalah nama kabupaten/kota dimana lokasi wilayah kerja dari lembaga pelatihan kerja yang tercantum pada layanan Sisnaker di kelebagaan.kemnaker.go.id				1. Kabupaten Ciarjur 2. Kota Bekasi 3. Kota Salatiga 4. Kabupaten Rembang 5. Kabupaten Buleleng 6. ...dst... 385. Kabupaten Aceh Singkil			
15.	Nomor Pelaporan Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP)		Nomor Pelaporan Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP)	nomor pelaporan yang muncul setelah membuat laporan WLKP secara <i>online</i>							
16.	Nama Jabatan (sesuai Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia)		Nama Jabatan (sesuai Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia)	nama jabatan (sesuai Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia)							
17.	Persyaratan Jabatan		Persyaratan Jabatan	persyaratan jabatan							
18.	Asal Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)		Asal LPTKS	asal LPTKS							
19.	Jenis Kelamin		Jenis kelamin	Jenis Kelamin adalah laki laki atau perempuan				1. Laki-laki 2. Perempuan			
20.	Pendidikan		Pendidikan	Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan				1. Sekolah Dasar (SD) 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)			

NO.	NAMA VARIABEL	ALIAS	KONSEP	DEFINISI	REPRENSI PEMILIHAN	REPRENSI WAKTU	TIPE DATA	KLASIFIKASI ISIAN	ATURAN VALIDASI	KALIMAT PERTANYAAN	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya -1 Tidak -2
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)
				sertifikat/ ijazah				3. Sekolah Menengah Atas (SMA) 4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 5. Akademi/Diploma 1/ Diploma II/Diploma III 6. Diploma IV/Strata Satu (S1) 7. Strata Dua (S2)/Strata Tiga (S3)			
21.	Lapangan Usaha/ Bidang Pekerjaan		Lapangan Usaha/Bidang Pekerjaan	Lapangan Usaha/Bidang Pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat kepala rumah tangga/ anggota rumah tangga bekerja				1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Pengadaan Distri, Gas, Uap Panas, Air Panas 5. Pengelolaan Air, Air Limbah, Daur Ulang sampah 6. ...dst... 16. Badan Internasional dan Lainnya 1. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) 2. Antar Kerja Lokal (AKL)			
22.	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan							

c. Metadata Indikator Data Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Metadata Statistik Indikator Data Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)* 2022																
Keterangan Kegiatan Statistik																
Nama Kegiatan:		Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri		Instansi:		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia										
Kode Kegiatan: (diisi oleh petugas)		00		Penyelenggara		Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja										
				Unit Kerja Eselon II:		Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri										
				Unit Kerja Eselon III:		Koordinator Pembinaan Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja										
NO.	NAMA INDIKATOR	KONSEP	DEFINISI	INTERPRETASI	METODE/RUMUS PENGHITUNGAN	UKURAN	SATUAN	KLASIFIKASI PENYAJIAN	APAKAH KOLOM (ii) INDIKATOR KOMPOSIT? Ya -1 Tidak -2	JIKA KOLOM (x) BERKODE -1	JIKA KOLOM (x) BERKODE -2	LEVEL ESTIMASI	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya -1 Tidak -2			
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	(xiii)	(xiv)	(xv)	(xvi)	(xvii)
1.	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)*	Tenaga Kerja yang Ditempatkan LPTKS	Tenaga Kerja yang Ditempatkan adalah bagian dari pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan LPTKS LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri.	-	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan oleh LPTKS	Jumlah	Orang	Jenis Kelamin Pendidikan, Lapangan Usaha	2	-	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Nasional	00	NIK	2	

3. Metadata Data Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

a. Metadata Kegiatan Data Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

METADATA STATISTIK KEGIATAN DATA PERUSAHAAN YANG MEMILIKI STRUKTUR SKALA UPAH* 2022			
Judul Kegiatan : Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan			Tahun: 2022
Kode Kegiatan (diisi oleh petugas) :			
Cara Pengumpulan Data :			3
Pencacahan Lengkap	-1	Kompilasi Produk Administrasi	-3
Survei	-2	Cara lain sesuai dengan perkembangan TI	-4
Sektor Kegiatan :			13
Pertanian dan Perikanan	-1	Perdagangan Internasional dan Neraca Perdagangan	-12
Demografi dan Kependudukan	-2	Ketenagakerjaan	-13
Pembangunan	-3	Neraca Nasional	-14
Proyeksi Ekonomi	-4	Indikator Ekonomi Bulanan	-15
Pendidikan dan Pelatihan	-5	Produktivitas	-16
Lingkungan	-6	Harga dan Paritas Daya Beli	-17
Keuangan	-7	Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar	-18
Globalisasi	-8	Perwilayahan dan Perkotaan	-19
Kesehatan	-9	Ilmu Pengetahuan dan Hak Paten	-20
Industri dan Jasa	-10	Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan	-21
Teknologi Informasi dan Komunikasi	-11	Transportasi	-22
Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?			2
Ya	-1		
Tidak	-2		
Jika "Ya", Identitas Rekomendasi : ...			
A. PENYELENGGARA			
1. Instansi Penyelenggara : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia			
2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara : ... Telepon : ... Faksimili : ... e-Mail : ...			
B. PENANGGUNG JAWAB			
3. Unit Penanggung Jawab pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) : JPT Madya : Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja JPT Pratama : Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan			
4. Penanggung Jawab Teknis : Jabatan : Koordinator ... Alamat : ... Telepon : ... Faksimili : ... e-Mail : ...			
C. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN			
1. Latar Belakang :			
2. Tujuan Kegiatan : Untuk mengetahui Perusahaan yang menerapkan struktur skala upah.			
3. Rencana Jadwal Kegiatan :			
Jadwal Kegiatan		Awal (Tgl-Bln-Thn)	Akhir (Tgl-Bln-Thn)
a. Perencanaan			
1) perencanaan kegiatan		1-1-20...	31-12-20...
2) desain		1-1-20...	31-12-20...
b. Pengumpulan			
3) pengumpulan data		1-1-20...	31-12-20...
c. Pemeriksaan			
4) pengelolaan data		1-1-20...	31-12-20...
d. Penyebarluasan			
5) analisis		1-1-20...	31-12-20...
6) diseminasi hasil		1-1-20...	31-12-20...
7) evaluasi		1-1-20...	31-12-20...

METADATA STATISTIK KEGIATAN DATA PERUSAHAAN YANG MEMILIKI STRUKTUR SKALA UPAH* 2022				
4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :				
No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
a.	Nama	Nama	nama orang/mentor pemagangan/kelompok/instansi/lembaga/penyelenggara pemagangan/perusahaan/badan usaha lainnya sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/paspor/akte notaris/izin usaha/surat keputusan (sk) pejabat yang berwenang/dokumen resmi negara lainnya	1 tahun
b.	Surel	Surel	Nama Surel adalah nama surat elektronik yang digunakan yang terdiri dari nama lokal, simbol @, dan nama domain	1 tahun
c.	Alamat	Alamat	alamat orang/instansi/lembaga/penyelenggara pemagangan/perusahaan/badan usaha lainnya sesuai yang tertera pada kartu tanda penduduk/paspor/akte notaris/izin usaha/surat keputusan pejabat yang berwenang/dokumen resmi negara lainnya yang memuat nama jalan, nomor bangunan, nama kelurahan atau kecamatan, nama kabupaten/kota, nama provinsi, nama Negara, dan kode pos	1 tahun
d.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB	identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran	1 tahun
e.	Jumlah tenaga kerja Warga Negara Indonesia (WNI)	Jumlah tenaga kerja WNI	jumlah tenaga kerja WNI	1 tahun
f.	Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA)	Jumlah TKA	jumlah TKA	1 tahun
g.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	NPWP	NPWP adalah nomor tanda wajib pajak sebagai identitas dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan	1 tahun
h.	Status Permodalan	Status Permodalan	pengelompokan perusahaan berdasarkan status permodalan yaitu: 1. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) 2. PMA (Penanaman Modal Asing) 3. <i>Join Venture</i> 4. Swasta Nasional	1 tahun
i.	Status Perusahaan	Status Perusahaan	status perusahaan meliputi kantor pusat dan cabang	1 tahun
D. DESAIN KEGIATAN				
1. Kegiatan ini dilakukan :				2
Hanya sekali (langsung ke angka 3)		-1	Berulang	-2
2. Jika "berulang" (sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkode -2), Frekuensi Penyelenggaraan :				4
Harian		-1	Empat Bulanan	-5
Mingguan		-2	Semesteran	-6
Bulanan		-3	Tahunan	-7
Triwulan		-4	> Dua Tahunan	-8
3. Tipe Pengumpulan Data :				3
<i>Longitudinal Panel</i>			-1	
<i>Longitudinal Cross Section</i>			-2	
<i>Cross Sectional</i>			-3	
4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data :				1
Seluruh Wilayah Indonesia			-1	
Sebagian Wilayah Indonesia			-2	
5. Jika "sebagian wilayah Indonesia" (sebagaimana dimaksud pada angka 4 berkode -2), Wilayah Kegiatan :				
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota		
a.				
b.				
c.				
d.	... dst			

METADATA STATISTIK KEGIATAN DATA PERUSAHAAN YANG MEMILIKI STRUKTUR SKALA UPAH* 2022			
6.	Metode Pengumpulan Data :		8
	Wawancara	-1	
	Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)	-2	
	Pengamatan (observasi)	-3	
	Pengumpulan Data sekunder	-4	
	Lainnya (sebutkan) ...	-16	
7.	Sarana Pengumpulan Data :		2
	<i>Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)</i>	-1	
	<i>Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)</i>	-2	
	<i>Computer-assisted Telephones Interviewing (CATI)</i>	-4	
	<i>Computer Aided Web Interviewing (CAWI)</i>	-8	
	<i>Mail</i>	-16	
	Lainnya (sebutkan) ...	-32	
8.	Unit Pengumpul Data :		8
	Individu	-1	
	Rumah Tangga	-2	
	Usaha/perusahaan	-4	
	Lainnya (sebutkan) ...	-8	
E. DESAIN SAMPEL (diisi jika cara pengumpulan Data merupakan survey sebagian)			
1.	Jenis Rancangan Sampel :		-
	<i>Single Stage/Fase</i>	-1	
	<i>Multi Stage/Fase</i>	-2	
2.	Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:		-
	Sampel Probabilitas	-1 -> ke angka 3 huruf a	
	Sampel Nonprobabilitas	-2 -> ke angka 3 huruf b	
3.	a. Jika "sampel probabilitas" (sebagaimana dimaksud pada angka 2), Metode yang Digunakan :		-
	<i>Simple Random Sampling</i>	-1	
	<i>Systematic Random Sampling</i>	-2	
	<i>Stratified Random Sampling</i>	-3 -> ke angka 4	
	<i>Cluster Sampling</i>	-4	
	<i>Multi Stage Sampling</i>	-5	
	b. Jika "sampel nonprobabilitas" (R.5.2. berkode 2), Metode yang Digunakan :		
	<i>Quota Sampling</i>	-6	
	<i>Accidental Sampling</i>	-7	
	<i>Purposive Sampling</i>	-8 -> ke angka 7	
	<i>Snowball Sampling</i>	-9	
	<i>Saturation Sampling</i>	-10	
4.	Kerangka Sampel Tahap Terakhir :		-
	<i>List Frame</i>	-1	
	<i>Area Frame</i>	-2	
5.	Fraksi Sampel Keseluruhan :		
	-		
6.	Nilai Perkiraan <i>Sampling Error</i> Variabel Utama :		
	-		
7.	Unit Sampel :		
	-		
8.	Unit Observasi :		
	-		
F. PENGUMPULAN DATA			
1.	Apakah Melakukan Uji Coba (<i>Pilot Survey</i>)?		2
	Ya	-1	
	Tidak	-2	
2.	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data :		2
	Kunjungan kembali (<i>revisit</i>)	-1	<i>Task Force</i> -4
	Supervisi	-2	Lainnya (sebutkan) ... -8
3.	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		2
	Ya	-1	
	Tidak	-2	
Pertanyaan angka 4 sampai dengan angka 7 ditanyakan jika sarana pengumpulan data melalui PAPI, CAPI, atau CATI (sebagaimana dimaksud dalam Huruf D angka 7)			
4.	Petugas Pengumpulan Data :		1
	Staf instansi penyelenggara	-1	
	Mitra/tenaga kontrak	-2	
	Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak	-3	
5.	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data :		2
	≤ SMP	-1	
	SMA/SMK	-2	
	Diploma I/II/III	-3	
	Diploma IV/S1/S2/S3	-4	

METADATA STATISTIK KEGIATAN DATA PERUSAHAAN YANG MEMILIKI STRUKTUR SKALA UPAH* 2022				
6. Jumlah Petugas :				
Supervisor/penyelia/pengawas			1 (satu) orang	
Pengumpul Data/enumerator			1 (satu) orang	
7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?				1
Ya			-1	
Tidak			-2	
G. PENGOLAHAN DAN ANALISIS				
1. Tahapan Pengolahan Data :				
Penyuntingan (<i>Editing</i>)	Ya -1		Tidak -2	1
Penyandian (<i>Coding</i>)	Ya -1		Tidak -2	1
Data Entry	Ya -1		Tidak -2	1
Penyahlahan (Validasi)	Ya -1		Tidak -2	1
2. Metode Analisis :				1
Deskriptif			-1	
Inferensia			-2	
Deskriptif dan Inferensia			-3	
3. Unit Analisis :				8
Individu	-1	Usaha/Perusahaan	-4	
Rumah Tangga	-2	Lainnya (sebutkan) ...	-8	
4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis :				1
Nasional	-1	Kecamatan	-8	
Provinsi	-2	Lainnya (sebutkan) ...	-16	
Kabupaten	-4			
H. DISEMINASI HASIL				
1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum :				
Tercetak (<i>hardcopy</i>)	Ya -1		Tidak -2	1
Digital (<i>softcopy</i>)	Ya -1		Tidak -2	1
Data Mikro	Ya -1		Tidak -2	2
2. Jika pilihan pada angka 1 dengan kode -1, maka Rencana Rilis Produk Kegiatan :				
Hasil	Tanggal - Bulan - Tahun			
Tercetak (<i>hardcopy</i>)	1 - Maret - 20...			
	1 - Agustus - 20...			
Digital (<i>softcopy</i>)	1 - Maret - 20...			
	1 - Agustus - 20...			
Data Mikro				

b. Metadate Variabel Data Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Metadate Statistik Variabel Data Perusahaan yang Memiliki Struktur Skala Upah* 2022											
Keterangan Kegiatan Statistik											
Nama Kegiatan:		Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan			Instansi:			Kementerian Ketenagakerjaan	Republik		
Kode Kegiatan: (diisi oleh petugas)		-			Penyelenggara			Indonesia			
								Unit Kerja Eselon I:	Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		
					Unit Kerja Eselon II:			Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan			
					Unit Kerja Eselon III:			Koordinator ...			
NO.	NAMA VARIABEL	ALIAS	KONSEP	DEFINISI	REFRENSI PEMILIHAN	REFRENSI WAKTU	TIPE DATA	KLASIFIKASI ISIAN	ATURAN VALIDASI	KALIMAT PERTANYAAN	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya -1 Tidak -2
1.	Nama	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)
			Nama	nama orang/mentor pemagangan/kelompok/instansi/lembaga/penyelenggara perusahaan/badan usaha lainnya sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/paspor/akte notaris /izin usaha/surat keputusan (sk) pejabat yang berwenang/dokumen resmi negara lainnya							
2.	Surel		Surel	Nama Surel adalah nama surat elektronik yang digunakan yang terdiri dari nama lokal, simbol @, dan nama domain							
3.	Alamat		Alamat	alamat orang/instansi/lembaga/penyelenggara pemagangan/perusahaan/badan usaha lainnya							

NO.	NAMA VARIABEL	ALIAS	KONSEP	DEFINISI	REFRENSI PEMILIHAN	REFRENSI WAKTU	TIBE DATA	KLASIFIKASI ISIAN	ATURAN VALIDASI	KALIMAT PERTANYAAN	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya -1 Tidak -2
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)
				sesuai yang tertera pada kartu tanda penduduk/paspor/akte notaris/izin usaha/surat keputusan pejabat yang berwenang/dokumen resmi negara lainnya yang memuat nama jalan, nomor bangunan, nama kelurahan atau kecamatan, nama kabupaten/kota, nama provinsi, nama Negara, dan kode pos							
4.	Nomor Induk Berusaha (NIB)		NIB	identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran jumlah tenaga kerja WNI							
5.	Jumlah tenaga kerja Warga Negara Indonesia (WNI)		Jumlah tenaga kerja WNI								
6.	Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA)		Jumlah TKA	jumlah TKA							
7.	Nomor Pokok Pajak (NPWP)		NPWP	NPWP adalah nomor tanda wajib pajak sebagai identitas dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan							
8.	Status Permodalan		Status Permodalan	pengelompokkan perusahaan berdasarkan status permodalan yaitu: 1. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) 2. PMA (Penanaman Modal Asing) 3. <i>Joint Venture</i> 4. Swasta Nasional				1. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) 2. PMA (Penanaman Modal Asing) 3. <i>Joint Venture</i> 4. Swasta Nasional			

NO.	NAMA VARIABEL	ALIAS	KONSEP	DEFINISI	REPRENSI PEMILIHAN	REPRENSI WAKTU	TIPE DATA	KLASIFIKASI ISIAN	ATURAN VALIDASI	KALIMAT PERTANYAAN	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya -1 Tidak -2 (xii)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	
9.	Status Perusahaan		Status Perusahaan	status perusahaan meliputi kantor pusat dan cabang				1. Kantor Pusat 2. Kantor Cabang			

c. Metadata Indikator Data Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Metadata Statistik Indikator Data Perusahaan yang Memiliki Struktur Skala Upah* 2022																
Keterangan Kegiatan Statistik																
Nama Kegiatan:		Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan			Instansi:			Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia								
Kode Kegiatan: (diisi oleh petugas)		-			Penyelenggara			Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja								
					Unit Kerja Eselon II:			Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan								
					Unit Kerja Eselon III:			Koordinator ...								
NO.	NAMA INDIKATOR	KONSEP	DEFINISI	INTERPRETASI	METODE/RUMUS PENGHITUNGAN	UKURAN	SATUAN	KLASIFIKASI PENYAJIAN	APAKAH KOLOM (ii) INDIKATOR KOMPOSIT? Ya -1 Tidak -2	JIKA KOLOM (x) BERKODE -1	JIKA KOLOM (x) BERKODE -2	LEVEL ESTIMASI	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya -1 Tidak -2			
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	(xiii)	(xiv)	(xv)	(xvi)	(xvii)
1.	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Struktur Skala Upah*	Struktur dan Skala Upah	Struktur dan Skala Upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat nilai kisaran upah dari yang terkecil maupun yang terendah dalam setiap golongan jabatan	-	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Struktur Skala Upah yang terdaftar dalam sistem informasi dan pelayanan ketenagakerjaan.	Jumlah	Perusahaan	Status Permodalan, Status Perusahaan	2	-	-	Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan	...	NIB	Nasional	1

4. Metadata Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

a. Metadata Kegiatan Data Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

METADATA STATISTIK KEGIATAN DATA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN PERUSAHAAN (WLKP) ONLINE* 2022			
Judul Kegiatan : Peningkatan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan		Tahun: 2022	
Kode Kegiatan (diisi oleh petugas) :			
Cara Pengumpulan Data :			3
Pencacahan Lengkap	-1	Kompilasi Produk Administrasi	-3
Survei	-2	Cara lain sesuai dengan perkembangan TI	-4
Sektor Kegiatan :			13
Pertanian dan Perikanan	-1	Perdagangan Internasional dan Neraca Perdagangan	-12
Demografi dan Kependudukan	-2	Ketenagakerjaan	-13
Pembangunan	-3	Neraca Nasional	-14
Proyeksi Ekonomi	-4	Indikator Ekonomi Bulanan	-15
Pendidikan dan Pelatihan	-5	Produktivitas	-16
Lingkungan	-6	Harga dan Paritas Daya Beli	-17
Keuangan	-7	Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar	-18
Globalisasi	-8	Perwilayahan dan Perkotaan	-19
Kesehatan	-9	Ilmu Pengetahuan dan Hak Paten	-20
Industri dan Jasa	-10	Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan	-21
Teknologi Informasi dan Komunikasi	-11	Transportasi	-22
Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?			2
Ya	-1		
Tidak	-2		
Jika "Ya", Identitas Rekomendasi : ...			
A. PENYELENGGARA			
1. Instansi Penyelenggara : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia			
2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara : ... Telepon : ... Faksimili : ... e-Mail : ...			
B. PENANGGUNG JAWAB			
1. Unit Penanggung Jawab pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) : JPT Madya : Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja JPT Pratama : Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan			
2. Penanggung Jawab Teknis : Jabatan : Koordinator Substansi Pembinaan Sistem dan Prosedur Pengawasan Ketenagakerjaan Alamat : ... Telepon : ... Faksimili : ... e-Mail : ...			
C. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN			
1. Latar Belakang :			
2. Tujuan Kegiatan : Untuk mengetahui jumlah Perusahaan yang terdaftar di Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online.			
3. Rencana Jadwal Kegiatan :			
Jadwal Kegiatan		Awal (Tgl-Bln-Thn)	Akhir (Tgl-Bln-Thn)
a. Perencanaan			
8) perencanaan kegiatan		1-1-20...	31-12-20...
9) desain		1-1-20...	31-12-20...
b. Pengumpulan			
10) pengumpulan data		1-1-20...	31-12-20...
c. Pemeriksaan			
11) pengelolaan data		1-1-20...	31-12-20...
d. Penyebarluasan			
12) analisis		1-1-20...	31-12-20...

METADATA STATISTIK KEGIATAN DATA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN PERUSAHAAN (WLKP) ONLINE* 2022				
13) diseminasi hasil	1-1-20...		31-12-20...	
14) evaluasi	1-1-20...		31-12-20...	
4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :				
No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
a.	Nama	Nama	nama orang/mentor pemagangan/keompok/instansi/lembaga/penyelenggara pemagangan/perusahaan/badan usaha lainnya sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/paspor/akte notaris/izin usaha/surat keputusan (sk) pejabat yang berwenang/dokumen resmi negara lainnya	1 tahun
b.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	NIK	Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia	1 tahun
c.	Nomor Telepon/ Telepon Genggam/ Faksimili	Nomor Telepon/ Telepon Genggam/ Faksimili	Nomor Telepon/Telepon Genggam/ Faksimili orang/mentor/pemagangan/ kelompok/instansi/lembaga/penyelenggara pemagangan/perusahaan dan lainnya yang terdiri dari digit angka	1 tahun
d.	Surel	Surel	Nama Surel adalah nama surat elektronik yang digunakan yang terdiri dari nama lokal, simbol @, dan nama domain	1 tahun
e.	Alamat	Alamat	alamat orang/instansi/lembaga/ penyelenggara pemagangan/perusahaan/ badan usaha lainnya sesuai yang tertera pada kartu tanda penduduk/paspor/akte notaris/izin usaha/surat keputusan pejabat yang berwenang/dokumen resmi negara lainnya yang memuat nama jalan, nomor bangunan, nama kelurahan atau kecamatan, nama kabupaten/kota, nama provinsi, nama Negara, dan kode pos	1 tahun
f.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB	identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran	1 tahun
g.	Lokasi Kerja/Usaha	Lokasi Kerja/Usaha	nama jalan/desa/kelurahan/kecamatan/ kabupaten/kota/provinsi/negara tempat usaha/kerja	1 tahun
h.	Nama Jabatan	Nama Jabatan	nama jabatan merupakan posisi/ kedudukan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan	1 tahun
i.	Tanggal Berdiri	Tanggal Berdiri	tanggal berdiri	1 tahun
j.	Kode Pos	Kode Pos	kode lokasi yang terdiri dari digit yang mengidentifikasi suatu daerah	1 tahun
k.	Website	Website	Website adalah halaman yang memuat informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet (<i>user</i>)	1 tahun
l.	Logo	Logo	Logo yaitu lambang/ikon yang berisi satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan dan sebagainya	1 tahun
m.	Negara	Negara	negara	1 tahun
n.	Jumlah Cabang di Indonesia	Jumlah Cabang di Indonesia	jumlah cabang kantor/ lembaga di Indonesia	1 tahun
o.	Jumlah Cabang di Luar Negeri	Jumlah Cabang di Luar Negeri	jumlah cabang kantor/lembaga/di luar negeri	1 tahun
p.	Status Kepemilikan	Status Kepemilikan	status kepemilikan	1 tahun
q.	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Sesuai Nomor Perizinan	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Sesuai Nomor Perizinan	KBLI sesuai nomor perizinan	1 tahun
r.	KBLI Sesuai Tanda	KBLI sesuai TDP	KBLI sesuai TDP	1 tahun

METADATA STATISTIK KEGIATAN DATA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN PERUSAHAAN (WLKP) ONLINE* 2022					
	Daftar Perusahaan (TDP)				
s.	Nomor Perizinan	Nomor Perizinan	Nomor Perizinan milik lembaga yang dikeluarkan pemerintah atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan daerah setempat		1 tahun
t.	Nomor TDP	Nomor TDP	nomor TDP		1 tahun
u.	Nomor Akta	Nomor Akta	nomor dari suatu surat/izin/peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi		1 tahun
v.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	NPWP	NPWP adalah nomor tanda wajib pajak sebagai identitas dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan		1 tahun
w.	Status (Pemilik/Pengurus)	Status (Pemilik/Pengurus)	status (pemilik/pengurus)		1 tahun
x.	Kode Pendaftaran	Kode Pendaftaran	kode pendaftaran		1 tahun
y.	Skala Perusahaan	Skala Perusahaan	pengelompokan perusahaan berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu: 1. Perusahaan Besar adalah perusahaan/perusahaan dengan cabang-cabangnya memiliki tenaga kerja 100 orang lebih 2. Perusahaan Menengah adalah perusahaan / perusahaan dengan cabang-cabangnya memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang 3. Perusahaan Kecil adalah perusahaan / perusahaan dengan cabang-cabangnya memiliki tenaga kerja 5 sampai 19 orang 4. Perusahaan Mikro adalah perusahaan memiliki tenaga kerja 1 sampai 4 orang		1 tahun
z.	Status Permodalan	Status Permodalan	pengelompokan perusahaan berdasarkan status permodalan yaitu: 1. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) 2. PMA (Penanaman Modal Asing) 3. <i>Join Venture</i> 4. Swasta Nasional		1 tahun
aa.	Lapangan Usaha/ Bidang Pekerjaan	Lapangan Usaha/ Bidang Pekerjaan	Lapangan Usaha / Bidang Pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat kepala rumah tangga/anggota rumah tangga bekerja		1 tahun
bb.	Obyek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Obyek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	obyek K3 antara lain pesawat uap, bejana tekanan, pesawat angkat/angkut, pesawat tenaga/produksi, listrik dan lainnya		1 tahun
cc.	Status Perusahaan	Status Perusahaan	status perusahaan meliputi kantor pusat dan cabang		1 tahun
D. DESAIN KEGIATAN					
1. Kegiatan ini dilakukan :					2
Hanya sekali (langsung ke angka 3)		-1	Berulang	-2	
2. Jika "berulang" (sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkode -2), Frekuensi Penyelenggaraan :					4
Harian		-1	Empat Bulanan	-5	
Mingguan		-2	Semesteran	-6	
Bulanan		-3	Tahunan	-7	
Triwulan		-4	> Dua Tahunan	-8	
3. Tipe Pengumpulan Data :					3
<i>Longitudinal Panel</i>			-1		
<i>Longitudinal Cross Section</i>			-2		
<i>Cross Sectional</i>			-3		
4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data :					1
Seluruh Wilayah Indonesia			-1		
Sebagian Wilayah Indonesia			-2		

METADATA STATISTIK KEGIATAN DATA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN PERUSAHAAN (WLKP) ONLINE* 2022			
5. Jika "sebagian wilayah Indonesia" (sebagaimana dimaksud pada angka 4 berkode -2), Wilayah Kegiatan :			
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	
a.			
b.			
c.			
d.	...dst		
6. Metode Pengumpulan Data :			8
Wawancara		-1	
Mengisi kuesioner sendiri (swacakah)		-2	
Pengamatan (observasi)		-3	
Pengumpulan Data sekunder		-4	
Lainnya (sebutkan) ...		-16	
7. Sarana Pengumpulan Data :			2
<i>Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)</i>		-1	
<i>Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)</i>		-2	
<i>Computer-assisted Telephones Interviewing (CATI)</i>		-4	
<i>Computer Aided Web Interviewing (CAWI)</i>		-8	
<i>Mail</i>		-16	
Lainnya (sebutkan) ...		-32	
8. Unit Pengumpul Data :			8
Individu		-1	
Rumah Tangga		-2	
Usaha/perusahaan		-4	
Lainnya (sebutkan) ...		-8	
E. DESAIN SAMPEL (diisi jika cara pengumpulan Data merupakan survey sebagian)			
1. Jenis Rancangan Sampel :			-
<i>Single Stage/Fase</i>		-1	
<i>Multi Stage/Fase</i>		-2	
2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:			-
Sampel Probabilitas		-1 -> ke angka 3 huruf a	
Sampel Nonprobabilitas		-2 -> ke angka 3 huruf b	
3. a. Jika "sampel probabilitas" (sebagaimana dimaksud pada angka 2), Metode yang Digunakan :			-
<i>Simple Random Sampling</i>		-1	
<i>Systematic Random Sampling</i>		-2	
<i>Stratified Random Sampling</i>		-3 -> ke angka 4	
<i>Cluster Sampling</i>		-4	
<i>Multi Stage Sampling</i>		-5	
b. Jika "sampel nonprobabilitas" (R.5.2. berkode 2), Metode yang Digunakan :			
<i>Quota Sampling</i>		-6	
<i>Accidental Sampling</i>		-7	
<i>Purposive Sampling</i>		-8 -> ke angka 7	
<i>Snowball Sampling</i>		-9	
<i>Saturation Sampling</i>		-10	
4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir :			-
<i>List Frame</i>		-1	
<i>Area Frame</i>		-2	
5. Fraksi Sampel Keseluruhan :			
-			
6. Nilai Perkiraan <i>Sampling Error</i> Variabel Utama :			
-			
7. Unit Sampel :			
-			
8. Unit Observasi :			
-			
F. PENGUMPULAN DATA			
1. Apakah Melakukan Uji Coba (<i>Pilot Survey</i>)?			2
Ya		-1	
Tidak		-2	
2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data :			2
Kunjungan kembali (<i>revisit</i>)	-1	<i>Task Force</i>	-4
Supervisi	-2	Lainnya (sebutkan) ...	-8
3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?			2
Ya		-1	
Tidak		-2	
Pertanyaan angka 4 sampai dengan angka 7 ditanyakan jika sarana pengumpulan data melalui PAPI, CAPI, atau CATI (sebagaimana dimaksud dalam Huruf D angka 7)			

METADATA STATISTIK KEGIATAN DATA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN PERUSAHAAN (WLKP) ONLINE* 2022			
4. Petugas Pengumpulan Data :			1
Staf instansi penyelenggara	-1		
Mitra/tenaga kontrak	-2		
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak	-3		
5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data :			2
≤ SMP	-1		
SMA/SMK	-2		
Diploma I/II/III	-3		
Diploma IV/S1/S2/S3	-4		
6. Jumlah Petugas :			
Supervisor/penyelia/pengawas	1 (satu) orang		
Pengumpul Data/enumerator	1 (satu) orang		
7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?			1
Ya	-1		
Tidak	-2		
G. PENGOLAHAN DAN ANALISIS			
1. Tahapan Pengolahan Data :			
Penyuntingan (<i>Editing</i>)	Ya -1	Tidak -2	1
Penyandian (<i>Coding</i>)	Ya -1	Tidak -2	1
Data Entry	Ya -1	Tidak -2	1
Penyahihan (Validasi)	Ya -1	Tidak -2	1
2. Metode Analisis :			1
Deskriptif	-1		
Inferensia	-2		
Deskriptif dan Inferensia	-3		
3. Unit Analisis :			8
Individu	-1	Usaha/Perusahaan	-4
Rumah Tangga	-2	Lainnya (sebutkan) ...	-8
4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis :			1
Nasional	-1	Kecamatan	-8
Provinsi	-2	Lainnya (sebutkan) ...	-16
Kabupaten	-4		
H. DISEMINASI HASIL			
1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum :			
Tercetak (<i>hardcopy</i>)	Ya -1	Tidak -2	1
Digital (<i>softcopy</i>)	Ya -1	Tidak -2	1
Data Mikro	Ya -1	Tidak -2	2
2. Jika pilihan pada angka 1 dengan kode -1, maka Rencana Rilis Produk Kegiatan :			
Hasil	Tanggal - Bulan - Tahun		
Tercetak (<i>hardcopy</i>)	1 - Maret - 20...		
	1 - Agustus - 20...		
Digital (<i>softcopy</i>)	1 - Maret - 20...		
	1 - Agustus - 20...		
Data Mikro			

b. Metadata Variabel Data Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Metadata Statistik Variabel Data Perusahaan yang terdaftar di WLKP Online* 2022											
Keterangan Kegiatan Statistik											
Nama Kegiatan:		Peningkatan Ketenagakerjaan	Sistem Ketenagakerjaan	Pengawasan	Instansi:		Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia	Republik			
Kode Kegiatan: (diisi oleh petugas)		-			Unit Kerja Eselon I: Penyelenggara		Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
					Unit Kerja Eselon II:		Direktorat Bina Sistem Ketenagakerjaan	Pengawasan			
					Unit Kerja Eselon III:		Koordinator Substansi Pembinaan Sistem dan Prosedur Pengawasan Ketenagakerjaan				
NO.	NAMA VARIABEL	ALIAS	KONSEP	DEFINISI	REFRENSI PEMILIHAN	REFRENSI WAKTU	TIPE DATA	KLASIFIKASI ISIAN	ATURAN VALIDASI	KALIMAT PERTANYAAN	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya - 1 Tidak - 2
1.	Nama	(iii)	(iv) Nama	(v) nama orang/mentor pemagangan/ kelompok/instansi/lembaga/ penyelenggara pemagangan/ perusahaan/badan usaha lainnya sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/paspor/akte notaris /izin usaha/surat keputusan (sk) pejabat yang berwenang/dokumen resmi negara lainnya	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)
2.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)		NIK	Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal							

NO.	NAMA VARIABEL	ALIAS	KONSEP	DEFINISI	REFRENSI PEMILIHAN	REFRENSI WAKTU	TIPE DATA	KLASIFIKASI ISIAN	ATURAN VALIDASI	KALIMAT PERTANYAAN	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya - 1 Tidak - 2
(f)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)
			/negara tempat usaha/kerja								
8.	Nama Jabatan		Nama Jabatan	nama jabatan merupakan posisi/ kedudukan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan							
9.	Tanggal Berdiri		Tanggal Berdiri	tanggal berdiri							
10.	Kode Pos		Kode Pos	kode lokasi yang terdiri dari digit yang mengidentifikasi suatu daerah							
11.	Website		Website	Website adalah halaman yang memuat informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet (user)							
12.	Logo		Logo	Logo yaitu lambang/ikon yang berisi satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan dan sebagainya							
13.	Negara		Negara	negara							
14.	Jumlah Cabang di Indonesia		Jumlah Cabang di Indonesia	jumlah cabang kantor/ lembaga di Indonesia							
15.	Jumlah Cabang di Luar Negeri		Jumlah Cabang di Luar Negeri	jumlah cabang kantor/lembaga/di luar negeri							
16.	Status Kepemilikan		Status Kepemilikan	status kepemilikan							
17.	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Sesuai Nomor Perizinan		Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Sesuai Nomor Perizinan	KBLI sesuai nomor perizinan							
18.	KBLI Sesuai Tanda Daftar Perusahaan		KBLI sesuai TDP	KBLI sesuai TDP							

NO.	NAMA VARIABEL	ALIAS	KONSEP	DEFINISI	REFRENSI PEMILIHAN	REFRENSI WAKTU	TIPE DATA	KLASIFIKASI ISI/AN	ATURAN VALIDASI	KALIMAT PERTANYAAN	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya - 1 Tidak - 2
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)
	(TDP)										
19.	Nomor Perizinan		Nomor Perizinan	Nomor Perizinan milik lembaga yang dikeluarkan pemerintah atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan daerah setempat							
20.	Nomor TDP		Nomor TDP	nomor TDP							
21.	Nomor Akta		Nomor Akta	nomor dari surat/izin/peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi							
22.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		NPWP	NPWP adalah nomor tanda wajib pajak sebagai identitas dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan							
23.	Status (Pemilik/Pengurus)		Status (Pemilik/Pengurus)	status (pemilik/pengurus)							
24.	Kode Pendaftaran		Kode Pendaftaran	kode pendaftaran							
25.	Skala Perusahaan		Skala Perusahaan	pengelompokan perusahaan berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu: 1. Perusahaan Besar adalah perusahaan/perusahaan dengan cabang-cabangnya memiliki tenaga kerja 100 orang lebih 2. Perusahaan Menengah adalah perusahaan / perusahaan dengan cabang-cabangnya memiliki				1. Perusahaan Besar 2. Perusahaan Menengah 3. Perusahaan Kecil 4. Perusahaan Mikro 5. N/A atau tidak diisi			

NO.	NAMA VARIABEL	ALIAS	KONSEP	DEFINISI	REFRENSI PEMILIHAN	REFRENSI WAKTU	TIPE DATA	KLASIFIKASI ISIAN	ATURAN VALIDASI	KALIMAT PERTANYAAN	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya -1 Tidak -2
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)
				<p>tenaga kerja 20 sampai 99 orang</p> <p>3. Perusahaan Kecil adalah perusahaan / perusahaan dengan cabang-cabangnya memiliki tenaga kerja 5 sampai 19 orang</p> <p>4. Perusahaan Mikro adalah perusahaan memiliki tenaga kerja 1 sampai 4 orang</p>							
26.	Status Permodalan		Status Permodalan	<p>pengelompokkan perusahaan berdasarkan status permodalan yaitu:</p> <p>1. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)</p> <p>2. PMA (Penanaman Modal Asing)</p> <p>3. <i>Joint Venture</i></p> <p>4. Swasta Nasional</p>				<p>1. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)</p> <p>2. PMA (Penanaman Modal Asing)</p> <p>3. <i>Joint Venture</i></p> <p>4. Swasta Nasional</p>			
27.	Lapangan Usaha/ Bidang Pekerjaan		Lapangan Usaha/ Bidang Pekerjaan	<p>Lapangan Usaha/Bidang Pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat kepala rumah tangga/anggota rumah tangga bekerja</p>				<p>1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</p> <p>2. Pertambangan dan Penggalian</p> <p>3. Industri Pengolahan</p> <p>4. Pengadaan Distri, Gas, Uap Panas, Air Panas</p> <p>5. Pengelolaan Air, Air Limbah, Daur Ulang sampah</p> <p>6. ...dst...</p> <p>16. Badan Internasional dan Lainnya</p>			
28.	Obyek Keselamatan dan		Obyek Keselamatan	<p>obyek K3 antara lain pesawat uap, bejana tekanan, pesawat</p>				<p>1. Pesawat Uap</p> <p>2. Bejana Tekanan</p>			

NO.	NAMA VARIABEL	ALIAS	KONSEP	DEFINISI	REPRENSI PEMILIHAN	REPRENSI WAKTU	TIPE DATA	KLASIFIKASI ISIAN	ATURAN VALIDASI	KALIMAT PERTANYAAN	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya - 1 Tidak - 2
(i)	(ii) Kesehatan Kerja (K3)	(iii)	(iv) dan Kesehatan Kerja (K3)	(v) angkat/angkut, pesawat tenaga/produksi, listrik dan lainnya	(vi)	(vii)	(viii)	(ix) 3. Pesawat Angkat/Angkut 4. Pesawat Tenaga/Produksi 5. Listrik 6. ...dst... 17. Alat Baru	(x)	(xi)	(xii)
29.	Status Perusahaan		Status Perusahaan	status perusahaan meliputi kantor pusat dan cabang				1. Kantor Pusat 2. Kantor Cabang			

c. Metadata Indikator Data Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Metadata Statistik Indikator Data Perusahaan yang terdaftar di WLKP Online* 2022

Keterangan Kegiatan Statistik

Nama Kegiatan:		Peningkatan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan		Instansi:		Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia							
Kode Kegiatan: (diisi oleh petugas)		-		Unit Kerja Eselon I:		Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja							
				Unit Kerja Eselon II:		Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan							
				Unit Kerja Eselon III:		Koordinator Substansi Pembinaan Sistem dan Prosedur Pengawasan Ketenagakerjaan							
NO.	NAMA INDIKATOR	KONSEP	DEFINISI	INTERPRETASI	METODE/RUMUS PENGHITUNGAN	UKURAN	SATUAN	KLASIFIKASI PENYAJIAN	APAKAH KOLOM (ii) INDIKATOR KOMPOSIT? Ya -1 Tidak -2	JIKA KOLOM (x) BERKODE -1	JIKA KOLOM (x) BERKODE -2	LEVEL ESTIMAS	APAKAH KOLOM (ii) DAPAT DI AKSES UMUM? Ya -1 Tidak -2
1.	Jumlah Perusahaan yang terdaftar di WLKP Online*	Perusahaan an Perusahaan an terdaftar WLKP Online	Perusahaan adalah: a. setiap usaha berbentuk badan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan	-	-	Jumlah	Perusahaan	Jenis Kelamin, Pendidikan, Status Disabilitas, Jenis Pekerjaan/Jabatan, Status permodalan, Status Perusahaan, Struktur Skala Upah, Lapangan Usaha	2	-	-	Nasional	1

Standar Data dan Metadata Data Ketenagakerjaan selengkapnya dapat dilihat pada laman: <https://smdata.kemnaker.go.id>

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH